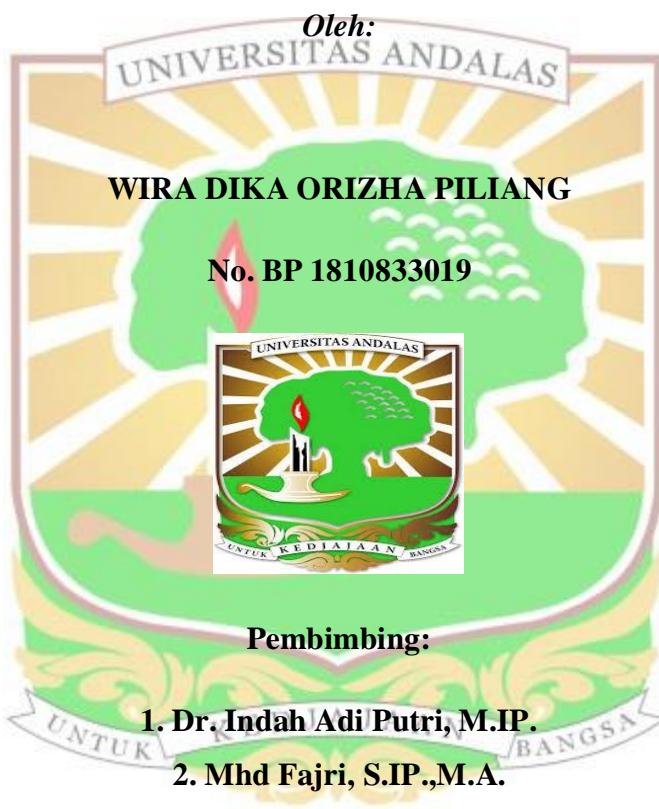


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAPORAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022

ABSTRAK

Wira Dika Orizha Piliang, 1810833019. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, judul “Implementasi Kebijakan Laporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020”. Dibimbing oleh Dr. Indah Adi Putri, M.IP. dan Mhd Fajri, S.IP.,MA.

Fenomena penolakan hasil rekapitulasi suara oleh pasangan calon yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 merupakan imbas dari tidak didiskualifikasinya pasangan calon yang diduga terlambat menyerahkan dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan dari KPU Kabupaten Sijunjung dengan tidak didiskualifikasinya pasangan calon yang diduga terlambat mengumpulkan LPPDK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terkait KPU Kabupaten Sijunjung yang tidak menggugurkan pasangan calon yang diduga terlambat mengumpulkan dokumen LPPDK sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan KPU RI nomor 5 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Hasil penelitian ini adalah bahwa penyebab KPU Kabupaten Sijunjung tidak mendiskualifikasi pasangan calon dikarenakan adanya surat edaran KPU Republik Indonesia nomor 454 mengenai petunjuk teknis tentang laporan dana kampanye. Sementara itu, dugaan keterlambatan tersebut muncul dari adanya permasalahan sistem dana kampanye secara online. Berdasarkan surat edaran, apabila terjadi permasalahan sistem, maka KPU dapat menerima dokumen LPPDK secara manual. Namun, munculnya dugaan tersebut juga disebabkan karena KPU Kabupaten Sijunjung yang tidak menyampaikan berita acara LPPDK kepada pasangan calon. Juga terdapat ketidaksiapan dari pasangan calon 03 dalam memenuhi persyaratan administratif dokumen LPPDK.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, LPPDK, Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020.

ABSTRACT

Wira Dika Orizha Piliang, 1810833019. S1 Thesis. Department of Political Science, Faculty of Social Science and Political Science, Andalas University. Thesis title "Implementation of the Campaign Fund report Policy of Sijunjung Regency Head Election in the 2020". Supervised by Dr. Indah Adi Putri, M.IP. and Mhd Fajri, S.IP.,M.A.

The phenomenon of rejection of the vote recapitulation results by the candidate who lost in the 2020 Sijunjung regional head election is the result of not disqualifying a candidate pair who is suspected of being late in submitting a Campaign Fund Revenue and Expenditure Report (LPPDK) document by the General Elections Commission (KPU) of Sijunjung Regency. The formulation of the problem in this research is how the consideration of the KPU of Sijunjung Regency by not disqualifying the candidate pair who is suspected of being late in collecting LPPDK. The purpose of this research was to describe and explain about the KPU of Sijunjung Regency which did not abort a candidate pair who was suspected of being late in submitting LPPDK documents as stated in KPU Republic of Indonesia regulations number 5 of 2017. This research uses a qualitative approach with a case study method to be able to answer research questions in depth. The results of this research are that the cause of the KPU of Sijunjung Regency did not disqualifying the candidate pair is due to the circular letter of the Republic of Indonesia KPU number 454 regarding technical instructions on campaign finance reports. Meanwhile, the alleged delay arose from problems with the online campaign finance system. Based on the circular, if there is a system problem, the KPU can receive the LPPDK document manually. However, the emergence of the allegation was also caused by the KPU of Sijunjung Regency which did not submit the LPPDK official report to the candidates. There is also the unpreparedness of candidate pair 03 in fulfilling the administrative requirements of the LPPDK document.

Keywords: Policy Implementation, LPPDK, Sijunjung Regency Election 2020.

